

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012–2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.
7. IKU SKPK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPK.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
    a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
    b. IKU SKPK.
(2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I ini.

Pasal 4

(1) Setiap SKPK wajib menyusun IKU SKPK.
(2) IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Format IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN IKU

Pasal 6

(1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017.
(2) Penetapan IKU SKPK mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis SKPK Tahun 2012-2017.
(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat indikator hasil *(outcome);* dan
    b. IKU SKPK paling kurang memuat indikator keluaran *(output)* sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
   a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
   b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
   c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 MARET 2016 M
13 J. AKHIR 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 MARET 2016 M
13 J. AKHIR 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 14

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 14 Tahun 2016
Tanggal 22 Maret 2016 M
13 J. Akhir 1437 H

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
MISI 1 **MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA)**						
1	Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Nilai Perolehan LAKIP Kabupaten	Perencanaan Pembangunan	Bag. Organisasi dan Kepegawaian Setdakab. Aceh Barat Daya	Seluruh LAKIP SKPK	Rangkuman seluruh LAKIP SKPK sehingga yang disesuaikan dengan RENSTRA dan RPJMN sehingga tersusun LAKIP Daerah (Kabupaten)
		Tersedianya Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat (IKM)	Perencanaan Pembangunan	Bag. Organisasi dan Kepegawaian Setdakab. Aceh Barat Daya	Laporan Hasil Survey	Hasil perhitungan rata - rata terhadap 14 unsur pelayanan
		Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal	Perencanaan Pembangunan	Dinas PU, Satpol PP & WH, BPBK, Disdukcapil, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPPMKS, BLHKP, BP4K, Disbudparpora, Dishubkominfo, KP2T, dan Disdik	Laporan penyusunan SKPK terkait	Persentase peningkatan Nilai SPM terhadap Nilai tahun sebelumnya
		Tersedianya Analisis Jabatan	Perencanaan Pembangunan	Bag. Organisasi dan Kepegawaian Setdakab. Aceh Barat Daya	Laporan penyusunan seluruh SKPK	Pembagian tugas berdasarkan Jabatan dan Tupoksi PNS
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun)	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Qanun)	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Perbup)	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak
		% Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Program RKPD Tahun n}}{\text{Program RPJMD pada Tahun berkesesuaian RKPD}} \times 100$
		Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka "	Statistik	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak
		Tersedianya Buku "PDRB Kabupaten"	Statistik	BAPPEDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Tersedianya regulasi peradilan adat kabupaten	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Majelis Adat Aceh, Bag. Keistimewaan dan Bag. Hukum Setdakab. Aceh Barat Daya, serta BPMBPKS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Ada / Tidak
		Cakupan Cabang Olah Raga yang mendulang Prestasi	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah cabang olah raga yang mendulang prestasi}}{\text{Jumlah lomba/event/cabang olah raga yang dikuti}} \times 100$
2	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	% Penduduk yang telah memiliki e-KTP	Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL	Data Base Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang memiliki E -KTP}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia >17 tahun atau telah menikah}} \times 100$
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk (%)	Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL	Data Base Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100$
		Rasio Pendampingan Keluarga Berencana Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PPKBG}}{\text{Jumlah Peserta Program KB Aktif}} \times 100$
		Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian}}{\text{Luas Areal Persawahan}} \times 100$
		Cakupan Penegakan PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP dan WH	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran perda}} \times 100$
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBK	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah mobil pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100$
		% Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Sosial	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
3	Terciptanya pemerintah yang baik *(good governance)*, bersih dan berwibwa *(clean government)* berdasarkan UUPA	Hasil audit BPK dengan opini terbaik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat	Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
		Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah Temuan kerugian daerah
		Jumlah Auditor Bersertifikasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah Auditor Bersertifikasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Tersedianya Website Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya (www.acehbaratdaya.go.id)	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tersedianya Informasi kepada Masyarakat
		Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) online www.lpse.acehbaratdaya.go.id	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
		Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Hukum Setdakab. Aceh Barat Daya	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah
MISI 2 **MENERAPKAN NILAI – NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM**						
4	Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffah (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas syariat islam dan Satpol PP dan WH	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun (X) - Jumlah pelanggaran tahun (X-1)}}{\text{Jumlah pelanggaran tahun (X-1)}} \times 100$
		Cakupan TPA Aktif (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Pendidikan Pembinaan Dayah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah TPA Aktif}}{\text{Jumlah seluruh TPA}} \times 100$
		Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pesantren (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Pendidikan Pembinaan Dayah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dayah dan Pesantren yang terbantu}}{\text{Jumlah seluruh Dayah dan Pesantren}} \times 100$
		Cakupan Peningkatan ZIS (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Baitul Mal Kab. Aceh Bara Daya	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah penyaluran ZIS}}{\text{Jumlah ZIS}} \times 100$
MISI 3 **MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**						
5	Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	Cakupan Koperasi Aktif (%)	Koperasi dan UKM	DISPERINDAGKOP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah koperasi}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
		Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%)	Koperasi dan UKM	DISPERINDAGKOP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100$
		Produktivitas Padi Per Hektare	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Produktivitas tanaman padi (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi (ton)}} \times 100$
		Produktivitas Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100$
6	Tersedianya lapangan pekerjaan baru	Jumlah wirausaha baru yang terlatih	Ketenagakerjaan	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru yang terlatih}}{\text{Jumlah keseluruhan wirausaha}} \times 100$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Ketenagakerjaan	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan}}{\text{Jumlah keseluruhan pencari kerja}} \times 100$
		Menurunnya angka pengganggguran	Ketenagakerjaan	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah penganggur usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$
7	Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	Menurunnya persentase penduduk miskin	Sosial	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk}} \times 100$
		Persentase (%) PMKS yang tersantuni	Sosial	DINSOSNAKERTRANS	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah PMKS yag tersantuni}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima santunan}} \times 100$
8	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah nelayan yang memiliki sarana tangkap dan pengolahan ikan}}{\text{Jumlah nelayan keseluruhan}} \times 100$
		Produktivitas padi per hektar	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Produktivitas padi per hektar (ton)}}{\text{Luas areal Persawahan per hektar (ton)}} \times 100$
		Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan, Pekerjaan Umum	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Lahan Pertanian/Perkebunan yang teraliri irigasi (m)}}{\text{Panjang Irigasi (m)}} \times 100$
MISI. 4 **MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**						
9	Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat (Mahasiswa)	Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/profesionalisme PNS (%)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPK	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah alokasi anggaran}}{\text{APBK}} \times 100$
		Rasio Mahasiswa /(i) yang Terbantu Dana Pendidikannya	Pendidikan	Bag. Keistimewaan Setdakab. Aceh Barat Daya dan DPKKK	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang Terbantu Dana Pendidikannya}}{\text{Jumlah mahasiswa keseluruhan}} \times 100$
MISI. 5 **MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**						
10	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	% Angka Melek Huruf	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat melek Huruf}}{\text{Jumlah keseluruhan masyarakat}} \times 100$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		% Angka Kelulusan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah kelulusan siswa}}{\text{Jumlah keseluruhan siswa}} \times 100$
		Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah guru berkualisifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Keseluruhan guru}} \times 100$
		APK SD/MI/ PAKET A	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SD/MI/ PAKET A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SD/MI/ PAKET A}} \times 100$
		APK SMP/MTS/ PAKET B	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SMP/MTS/ PAKET B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMP/MTS/ PAKET B}} \times 100$
		APK SMA/SMK/MA/PAKET C	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C}} \times 100$
		APM SD/MI/PAKET A	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SD/MI/PAKET A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SD/MI/PAKET A}} \times 100$
		APM SMP/MTS/PAKET B	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMP/MTS/PAKET B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMP/MTS/PAKET B}} \times 100$
		APM SMA/SMK/MA/PAKET C	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C}} \times 100$
		Rata – rata Nilai UNAS SD/MI	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang lulus UNAS SD/MI}}{\text{Jumlah siswa yang mengikuti UNAS SD/MI}} \times 100$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Rata – rata Nilai UNAS SMP/MT	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang lulus UNAS SMP/MT}}{\text{Jumlah siswa yang mengikuti UNAS SMP/MT}} \times 100$
		Rata – rata Nilai UNAS SMA/SMK/MA	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa yang lulus UNAS SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa yang mengikuti UNAS SMA/SMK/MA}} \times 100$
11	Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah keseluruhan bayi lahir}} \times 100$
		Angka Kematian Bayi	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kelahiran selamat}}{\text{Jumlah Ibu yang melahirkan}} \times 100$
		Rasio Posyandu per satuan Balita	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah POSYANDU}}{\text{Jumlah BALITA}} \times 100$
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa / kelurahan}} \times 100$
		Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{PUSKESMAS yang menyelenggarakan rawat inap}}{\text{Jumlah keseluruhan PUSKESMAS}} \times 100$
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100$
		Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di wilayah kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100$

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu x 100
		Cakupan pelayanan nifas	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas yang diberikan meliputi : 1) Pemeriksaan tekanan darah,nadi, respirasi,dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan, 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200000IU sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Neonatus adalah bayi berumur 0 – 28 hari Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah penduduk Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS
		Cakupan pelayanan anak balita	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayan kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama x 100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100
		Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah siswa SD yang terjaring kesehatan / Jumlah Keseluruhan Siswa SD x 100
		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu
		Cakupan Desa Siaga Aktif	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk
		Rasio tenaga para medis terhadap penduduk	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah tenaga medis / Jumlah penduduk x 100
		Rasio dokter terhadap penduduk	Kesehatan	DINKES	Profil Kesehatan	Jumlah dokter / Jumlah penduduk x 100
MISI. 6 **MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**						
12	Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara optimal	Tersediannya Website Pariwisata PEMDA	Komunikasi dan Informatika	Dinas kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tersedianya Informasi kepada Masyarakat
13	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Cakupan lahan persawahan rakyat yang terbantu pengadaan bibitnya.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Luas lahan persawahan rakyat yang terbantu pengadaan bibit / Jumlah pengadaan bibit x 100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
14	Terpeliharanya Kualitas lingkungan	Persentase pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup	BLHKP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$
		Cakupan DAS yang direboisasi (Penghijauan)	Lingkungan Hidup	BLHKP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Luas DAS yang direboisasi}}{\text{Luas DAS}} \times 100$
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DISPENDA	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Peningkatan PAD
		Persentase Qanun / Pajak Daerah dan Retribusi yang telah disahkan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bag. Hukum Setdakab. Aceh Barat Daya	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah yang di sahkan}}{\text{Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah yang di ajukan}} \times 100$
MISI. 7 **MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF**						
16	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi	Panjang jalan baru yang terbangun	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Panjang jalan baru yang terbangun (Km)}}{\text{Panjang jalan keseluruhan (Km)}} \times 100$
		Jembatan baru yang terbangun	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jembatan baru yang terbangun}}{\text{Jembatan keseluruhan}} \times 100$
		Cakupan jalan rusak yang diperbaiki	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Panjang jalan yang diperbaiki (Km)}}{\text{Panjang jalan keseluruhan (Km)}} \times 100$
		Persentase pemakaian Air Bersih (PDAM)	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$
17	pertumbahan (growth center) ekonomi	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun	Penanaman Modal	KP2T, DISPERINDAGKOP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
18	Meningkatkan Jumlah Investor investasi di daerah	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi	Penanaman Modal	KP2T, DISPERINDAGKOP dan DISTAMBEN	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang berinvestasi}}{\text{Jumlah keseluruhan perusahaan}} \times 100$

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2016
Tanggal 22 MARET 2016 M
13 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPK...) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : ...../2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama SKPK.....) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPALA (...nama SKPK....) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ..... Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPK...);

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama SKPK...)

Mengingat :

1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPK...) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPK...) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...*nama* SKPK...) Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPK...) Kabupaten dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPK...) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama SKPK...) Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALA (...nama SKPK.....)
Kabupaten Aceh Barat Daya,

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat /Golongan)
(NIP. .....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 19 Tahun 2016
Tanggal 22 MARET 2016 M
13 J. AKHIR 1437 H

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPK...)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Nama SKPK :
Tugas :
Fungsi : 1.
2.
3. Dst

No.	Sasaran strategis								Indikator Kerja Utama SKPK	Bidang Urusan	Unit SKPK Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra SKPK				Sasaran RPJMD yang diacu								

KEPALA (...nama SKPK.....)
Kabupaten Aceh Barat Daya,

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat /Golongan)
(NIP. .....)

Ttd.

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN